

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KOTA BANDA ACEH

2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

KOTA BANDA ACEH

2016

http://www.bandaacehkota.bps.go.id



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KOTA BANDA ACEH 2016

ISSN	:	2541-271X
Katalog BPS	:	7102025.1171
Nomor Publikasi	:	11714.1703
Ukuran Buku	:	17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman	:	vii + 70 halaman

Naskah:

Seksi Statistik Distribusi BPS Kota Banda Aceh

Gambar Kulit:

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
BPS Kota Banda Aceh

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan potensi keuangan daerahnya masing-masing sebagai bagian dari perwujudan keberhasilan pembangunan nasional. Namun, ketersediaan dana sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan, dan oleh karenanya sumber pendapatan daerah kabupaten/kota yang utama adalah dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Agar pembagian DAU ke daerah Kabupaten/Kota menjadi adil, proporsional dan merata, diperlukan dukungan data dasar yang valid, akurat dan terkini. Kebutuhan fiskal yang dianggarkan melalui DAU dihitung berdasarkan beberapa komponen, salah satunya adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Dengan diterbitkannya publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Banda Aceh Tahun 2016 ini, diharapkan agar bahan perencanaan pembangunan bagi pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan demikian, pembangunan yang lebih baik dan terarah dapat diwujudkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan dan penerbitan publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Banda Aceh Tahun 2016. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan para pengguna data.

Banda Aceh, September 2017

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Banda Aceh

Ir. Hamdani, M. S. M.
NIP. 19631231 199103 1 024

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Kegunaan	12
BAB 2. METODOLOGI	14
2.1. Ruang Lingkup	15
2.2. Metode Penghitungan.....	16
2.2.1. Penghitungan IKK 2016.....	16
2.2.2. Penghitungan Diagram Timbang IKK 2016.....	18
2.3. Kegiatan Pengumpulan Data	31
2.4. Kuesioner yang Digunakan.....	32
2.5. Konsep dan Definisi	33
BAB 3. Statistik IKK	38
3.1. Keadaan Geografis.....	39
3.2. Penduduk	40
3.3. Keuangan Daerah	42
3.4. IKK Kota Banda Aceh Tahun 2016.....	44
3.4. Perbandingan IKK Kota Banda Aceh dengan Kabupaten/Kota lain.....	45
BAB 4. Penutup	51
4.1. Kesimpulan	52

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.	Beberapa Kemungkinan Penghitungan Cela Fiskal dan Dana Alokasi Umum	11
Tabel 2.	Realisasi Keuangan Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh, 2016	43
Tabel 3.	Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2016.....	44
Tabel 4.	Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016	44
Tabel 5.	Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi di Indonesia, 2016	45

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Komponen Dana Alokasi Umum Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004	4
Gambar 2. Tahapan Formulasi Dana Alokasi Umum	10
Gambar 3. Kategori Sektor Industri	19
Gambar 4. Hubungan antara Proyek, Sistem dan Komponen.....	25
Gambar 5. Peta Wilayah Kota Banda Aceh	40
Gambar 6. Kepadatan Penduduk Kota Banda Aceh	42
Gambar 7. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016	48
Gambar 8. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi di Indonesia, 2016	49

DAFTAR LAMPIRAN

Hal

Lampiran 1. Contoh Kuesioner VIKK2016 54

1. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang**
- 1.2. Kegunaan**

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan nasional Indonesia, dewasa ini pemerintah menempuh kebijakan Otonomi Daerah. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah ketimpangan antar daerah melalui pemerataan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sebagian besar urusan Pemerintahan Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, kedudukan pemerintah daerah Kabupaten/Kota menjadi sangat strategis. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada 1 Januari 2001, Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan potensi keuangan daerahnya sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selama beberapa tahun terakhir, DAU merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah, begitu juga untuk Kota Banda Aceh. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Azas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang mendasari penghitungan DAU memerlukan dukungan data yang valid, akurat dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional dan merata. Komponen Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, terdiri dari dua komponen yaitu Alokasi Dasar (AD) dan Cela Fiskal (CF) dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rumus Formula DAU

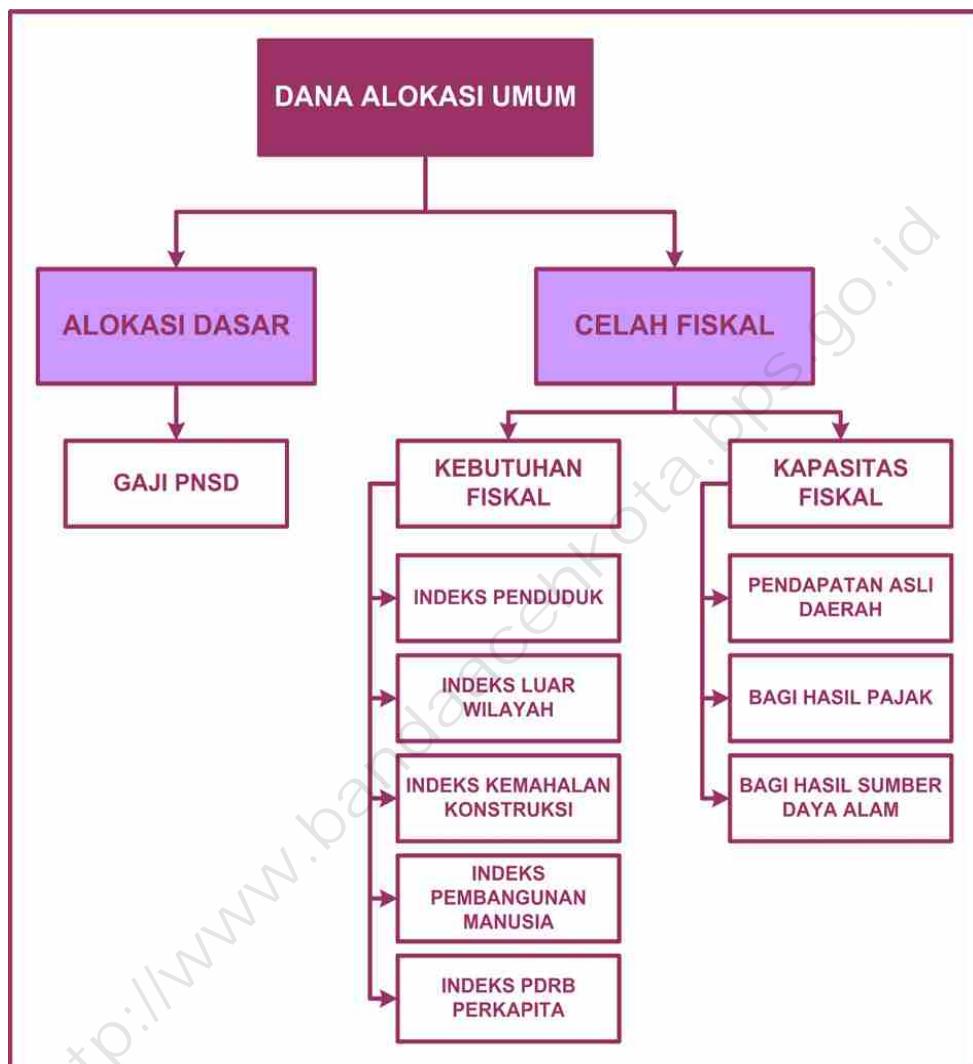
$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Cela Fiskal (CF)}$$

dimana :

AD = Gaji PNS Daerah

CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

Gambar 1. Komponen Dana Alokasi Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004



Alokasi Dasar

Pada pasal 2 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan jumlah gaji

Pegawai Negeri Sipil Daerah secara proporsional. Dana Alokasi Umum atas dasar Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil secara proporsional termasuk kenaikan gaji pokok, pemberian gaji bulan ke-13 (ketiga belas), dan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang termasuk daerah otonom baru dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk, dengan menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai sesuai dengan ketersediaan data.

Pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, komponen belanja hanya belanja pegawai sipil daerah. Komponen belanja pegawai untuk masing-masing daerah (misal daerah A) dapat dirumuskan sebagai berikut;

$$\text{Alokasi DAU dari komponen belanja} = \frac{\text{Belanja pegawai daerah A}}{\text{pegawai daerah A} \quad \text{Total belanja pegawai seluruh daerah}} \times \frac{\text{Total alokasi DAU}}{\text{dari komponen belanja pegawai}}$$

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional demokratis, transparan, dan efisiensi dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Celah Fiskal (CF)

Celah fiskal merupakan selisih dari **kebutuhan fiskal** dan **kapasitas/potensi fiskal** daerah tersebut.

Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal daerah secara umum mengindikasikan perkiraan besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang diukur dengan variabel-variabel berikut :

1. Jumlah Penduduk
2. Luas Wilayah

3. Indeks Kemahalan Konstruksi
4. Indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita
5. Indeks Pembangunan Manusia

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik (BPS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, maka dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan penyedia data untuk empat komponen (kecuali luas wilayah) dari lima komponen kebutuhan fiskal tersebut.

Jumlah penduduk mencerminkan tingkat kepadatan suatu wilayah dan menjadi penimbang bagi pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan. Konsep penduduk yang dimaksud adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan suatu wilayah yang direpresentasikan dalam tiga dimensi yaitu usia hidup (*longevity*) atau kesehatan, pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living standards*).

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh sektor ekonomi pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Besarnya nilai PDRB pada masing-masing sektor ekonomi menggambarkan sejauh mana ketergantungan suatu daerah terhadap salah satu sektor ekonomi. Selain itu, PDRB juga dapat digunakan untuk

mengukur kemajuan pembangunan suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang dapat dilihat berdasarkan besarnya angka pertumbuhan ekonomi.

IKK adalah indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Konstruksi/Harga Bangunan (TKK) suatu kabupaten/kota atau provinsi dengan TKK rata-rata nasional. IKK dapat mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur, dimana semakin sulit letak geografis suatu daerah maka harga bahan bangunan di daerah tersebut semakin tinggi. Perbedaan kondisi geografis dan jarak antar daerah menyebabkan terjadinya perbedaan pembiayaan dalam pembangunan tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar digunakannya Indeks Kemahalan Konstruksi untuk penyesuaian kebutuhan daerah dilihat dari sektor bangunan/konstruksi.

Mengingat pentingnya ketersediaan data komponen penentu besarnya nilai DAU yang valid dan mutakhir, menjadi sangat krusial bagi setiap daerah termasuk Kota Banda Aceh untuk dapat menyajikan data keempat komponen tersebut, salah satunya adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Banda Aceh tahun 2016.

Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang mencerminkan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan, berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak
3. Dana Bagi Hasil (DBH) SDA

Pengalokasian DAU berdasarkan formula dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CF = \text{Kebutuhan Fiskal} (K_{bf}) - \text{Kapasitas Fiskal} (K_{pf})$$

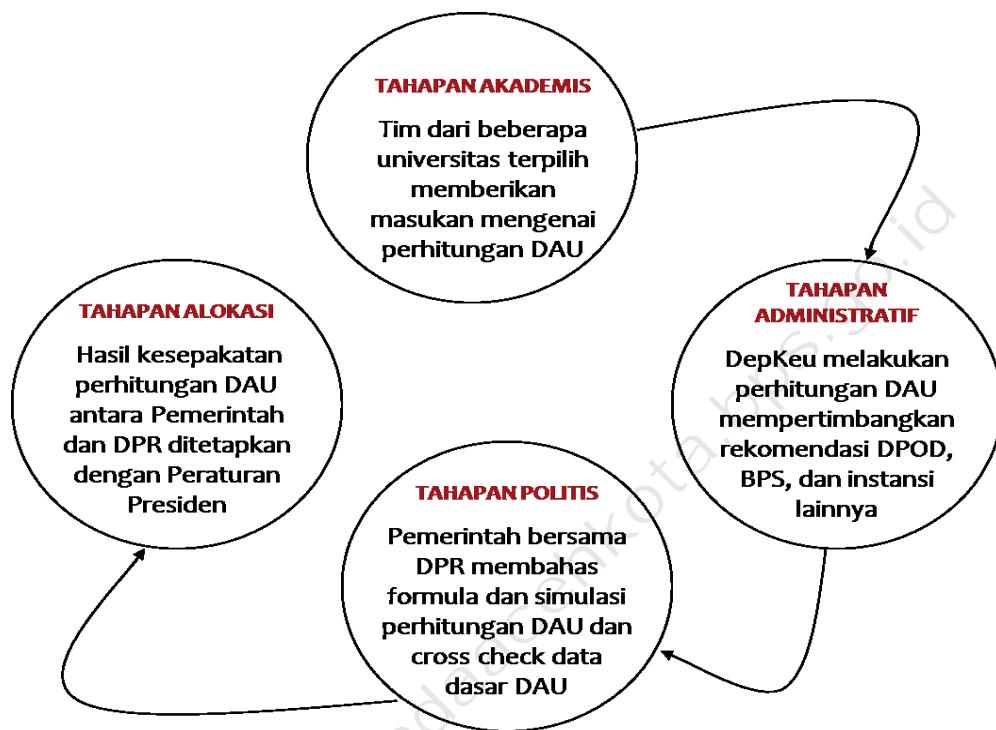
$$K_{bf} = TBR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IPM + \alpha_4 IKK + \alpha_5 IPDRB/\text{kapita})$$

$$K_{pf} = PAD + DBH \text{ Pajak} + DBH \text{ SDA}$$

dimana:

CF	= Cela Fiskal
K _{bf}	= Kebutuhan Fiskal
TBR	= Total Belanja Rata-Rata APBD
IP	= Indeks Jumlah Penduduk
IW	= Indeks Luas Wilayah (Depdagri dan Bakosurtanal)
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
IKK	= Indeks Kemahalan Konstruksi
IPDRB	= Indeks PDRB Perkapita
α	= Bobot Indeks
K _{pf}	= Kapasitas Fiskal
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DBH Pajak	= Dana Bagi Hasil Pajak
DBH SDA	= Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Sumber Daya Alam

Gambar 2. Tahapan Formulasi Dana Alokasi Umum



Kebijakan *hold harmless* atau alokasi DAU yang tidak boleh lebih rendah dibandingkan DAU sebelumnya yang tidak berlaku lagi sejak tahun 2008 berdampak pada perolehan DAU yang sepenuhnya berdasar pada formula DAU (penghitungan DAU murni). Sehingga dalam mengatasi ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah, ada beberapa kemungkinan penghitungan celah fiskal maupun DAU.

Tabel 1. Beberapa Kemungkinan Penghitungan Celah Fiskal dan Dana Alokasi Umum

ALTERNATIF (1)	ALOKASI DASAR (2)	CELAH FISKAL (3)	JUMLAH DAU (4)
1	AD	>0	AD+CF
2	AD	0	AD
3	AD	<0 <AD	AD-CF
4	AD	<0 atau \geq AD	0

1. Apabila Celah Fiskal positif ($CF>0$) atau kebutuhan fiskal lebih besar dari pada kapasitas fiskal, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah dengan nilai Celah Fiskal.
2. Apabila Celah Fiskal sama dengan nol ($CF=0$) atau kebutuhan fiskal sama dengan kapasitas fiskal, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar.
3. Apabila Celah Fiskal negatif ($CF<0$) atau kebutuhan fiskal lebih kecil daripada kapasitas fiskal dan nilai celah fiskal lebih kecil dari alokasi dasar, maka daerah akan menerima DAU sebesar alokasi dasar dikurangi dengan nilai celah fiskal.
4. Apabila Celah Fiskal negatif ($CF<0$) atau kebutuhan fiskal lebih kecil daripada kapasitas fiskal dan nilai celah fiskal sama atau lebih besar dari alokasi dasar, maka hasil penghitungan DAU adalah nol

atau negatif. Untuk kasus negatif akan disesuaikan menjadi nol yang berarti daerah tidak menerima DAU.

1.2. Kegunaan

Dalam pelaksanaan program pembangunan, pemerintah hendaknya mampu melaksanakan pembangunan secara merata dan terarah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan kinerja pemerintah. Semakin baik kinerja pemerintah maka semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Banda Aceh tahun 2016 diharapkan dapat menjadi *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis Kota Banda Aceh, karena semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga barang konstruksi di daerah tersebut. Dengan demikian, sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan IKK bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, perlu dilakukan analisis untuk melihat secara utuh berbagai aspek tentang IKK seperti:

1. Metode penghitungan IKK 2016.
2. Peranan IKK dalam menentukan Dana Alokasi Umum (DAU).
3. Perbandingan IKK Kota Banda Aceh tahun 2016 terhadap Kabupaten/Kota secara Nasional.

Adapun maksud dan kegunaan pengukuran IKK Kota Banda Aceh tahun 2016 itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data dasar dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2016 dan utamanya digunakan sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal dalam penghitungan DAU untuk pengalokasian anggaran tahun 2016.
2. Sebagai alat ukur tingkat kemahalan harga bangunan dan perbandingan tingkat kesulitan geografis dengan kabupaten/kota lainnya.
3. Membantu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan konstruksi di Kota Banda Aceh.
4. Sebagai standarisasi harga khususnya barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan konstruksi, sehingga dapat ditentukan kewajaran suatu anggaran proyek oleh tim pembahas anggaran proyek.

2. METODOLOGI

- 2.1 Ruang Lingkup**
- 2.2 Metode Penghitungan**
 - 2.2.1. Penghitungan IKK**
 - 2.2.2. Penghitungan Diagram Timbang IKK 2016**
- 2.3 Kegiatan Pengumpulan Data**
- 2.4 Kuesioner yang Digunakan**
- 2.5 Konsep dan Definisi**

2. METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis, karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model. Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metoda penghitungan, yaitu pertama dengan pendekatan input, dan kedua dengan pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metoda ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*. Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada pendekatan output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk manajemen cost dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk

tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah. Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja tanpa memasukan manajemen *cost* dan keuntungan kontraktor. Caranya adalah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarannya berada diatas harga input tetapi di bawah harga output karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen *Bill of Quantity* (BoQ) satu proyek yang sudah selesai. Dengan digunakannya realisasi APBD pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka setiap tahun IKK satu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota tahun 2016 mencakup 508 Kabupaten/Kota, sedangkan IKK Provinsi dihitung di 34 Provinsi.

2.2 Metode Penghitungan

2.2.1 Penghitungan IKK 2016

Untuk menghitung indikator IKK ini dibutuhkan beberapa komponen antara lain data harga konstruksi yang meliputi harga bahan

bangunan/konstruksi, harga sewa alat-alat berat konstruksi, upah jasa konstruksi, dan data bobot/diagram timbangan umum IKK Kabupaten/Kota berupa nilai masing-masing bahan bangunan utama yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas dari 5 jenis bangunan. Survei ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk menyediakan data harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat-alat berat konstruksi, dan upah jasa konstruksi. Pada penghitungan IKK tahun 2015, Kota Surabaya dijadikan kota referensi dengan maksud supaya ada keterbandingan dengan IKK tahun sebelumnya. Untuk IKK tingkat provinsi data harga yang digunakan adalah rata-rata geometrik setiap komoditi dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi masing-masing dengan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi referensinya.

Misalkan p_{kn} adalah harga komponen konstruksi n di kabupaten k ($k=1,2,\dots,K$; $n=1,2,\dots,N$). Maka model statistik metoda Country Product Dummy (CPD) dituliskan sebagai

$$\begin{aligned}\ln p_{kn} &= \ln a_k + \ln b_n + \ln u_{kn} \\ &= a_k + \gamma_n + V_{kn}\end{aligned}$$

Parameter a_k diartikan sebagai tingkat harga konstruksi di kabupaten k relatif terhadap harga konstruksi di kabupaten lain yang sedang dibandingkan. Bila a_k adalah harga konstruksi di Kabupaten K relatif terhadap 1 (satu), yaitu harga di Kabupaten X. Dengan kata lain

harga konstruksi di Kabupaten K setinggi ak dibanding harga konstruksi di Kabupaten X. Karenanya IKK di Kabupaten K dinyatakan sebagai $IKK_k = \exp(a_k)$. Persamaan di atas dikalikan dengan 100 sehingga perbandingan data dinyatakan dalam persen.

2.2.2 Penghitungan Diagram Timbang IKK 2016

Basket of Construction Components Approach (BOCC)

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components Approach* (BOCC). Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BOQ).

Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan

estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokkan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading*.

Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang disebut sebagai *basic heading* sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini,

Gambar 3. Kategori Sektor Industri



Gedung dan Bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun dan perumahan dinas.
2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental lainnya.

Klasifikasi jalan, irigasi dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang adalah sebagai berikut:

1. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
 - a. Bangunan Pengairan meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendungan (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase, irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendalian banjir, tanggul laut, krib, waduk,
 - b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan:
 - a. Pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, *drainase* jalan, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Bangunan jalan dan jembatan kereta meliputi pembangunan jalan dan jembatan kereta.
 - c. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan dan penahan gelombang.
3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi
 - a. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, transmisi tegangan tinggi.
 - b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan

pemancar/penerima radar, bangunan antena.

- c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
- d. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi menara pemancar radar *microwave*, bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit,
- e. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase pada gedung.
- f. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
- g. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan bukan tempat tinggal.
- h. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api dan instalasi listrik lapangan udara.
- i. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

Sedangkan jenis bangunan yang tercakup dalam klasifikasi bangunan lainnya adalah sebagai berikut: bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir dan

sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi *prefab* dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, dekorasi eksterior serta peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Sistem Konstruksi untuk Bangunan Rumah dan Gedung

Nama Sistem	Penjelasan Sistem
<i>Site-work</i> (Persiapan)	Sistem yang berisi komponen konstruksi yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan dalam rangka pembangunan suatu proyek
<i>Substructure</i>	Sistem yang berisi komponen struktur dan jenis pekerjaan dibawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban bagian bangunan yang berada di atasnya seperti balok, atap dan lainnya
<i>Superstructure</i>	Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis pekerjaan diatas permukaan tanah. Sistem ini menahan beban bangunan di atasnya
<i>Exterior</i> <i>Shell/Building</i> <i>Envelope</i>	Sistem yang berisi komponen konstruksi yang menyelimuti bangunan (atap). Bangunan ini memberi beban pada system superstructure pada bangunan
<i>Interior</i> <i>Partitions</i>	Sistem yang terdiri dari semua dinding dan bagian bangunan untuk jalan keluar masuk bangunan

Interior and Exterior Finishes	Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang bertujuan untuk memperindah bangunan, misalnya pengecatan
Mechanical and Plumbing	Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang mengatur suhu, saluran air, komunikasi, sistem pemadam kebakaran dan lainnya
Electrical	Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang berhubungan dengan distribusi listrik dalam sebuah bangunan

Sistem Konstruksi untuk Jenis Bangunan Lainnya

Nama Sistem	Penjelasan Sistem
<i>Site-work</i> (Persiapan)	Sistem yang berisi komponen konstruksi yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan dalam rangka pembangunan suatu proyek
<i>Substructure</i>	Sistem yang berisi komponen struktur dan jenis pekerjaan dibawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban dari struktur/bagian bangunan yang berada di atasnya
<i>Superstructure</i>	Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis pekerjaan diatas permukaan tanah. Sistem ini menahan beban bangunan di atasnya
<i>Mechanical Equipment</i>	Perlengkapan mekanik yang dipasang pada suatu bangunan seperti pompa, turbin, pipa penghubung, <i>tower</i> pendingin, dan lainnya
<i>Electrical</i>	Peralatan yang terpasang pada bangunan yang

<i>Equipment</i>	digunakan untuk sistem distribusi tenaga listrik, distribusi panel, pusat kontrol pencahayaan, komunikasi dan lainnya
<i>Underground Utility</i>	Jaringan bawah tanah, sistem atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi, menyimpan, transmisi dan distribusi komunikasi atau telekomunikasi, listrik, gas, minyak bumi, saluran pembuangan akhir, dan lainnya. Peralatan ini termasuk pipa, kabel, <i>fiber optic cable</i> , dan lainnya yang terpasang dibawah permukaan tanah

Komponen Konstruksi

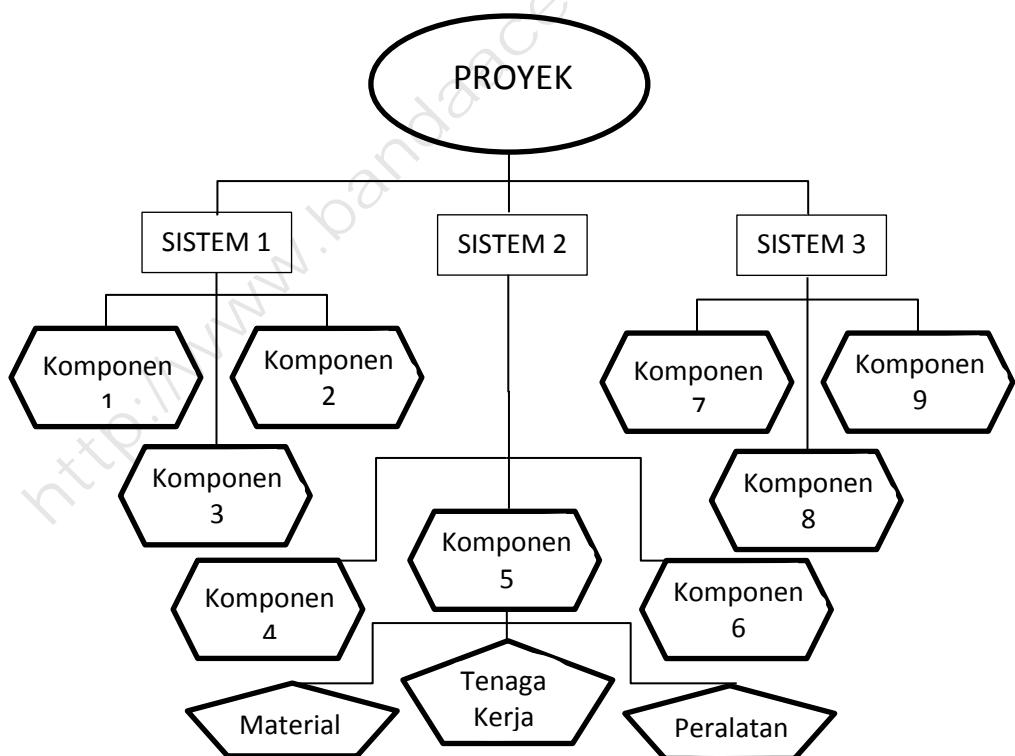
Komponen adalah kombinasi dari beberapa material pada lokasi akhir yang dapat diidentifikasi secara jelas pada tujuannya dalam sebuah proyek bangunan dan juga sistemnya. Contoh komponen adalah beton, pengecatan eksterior, pengecatan interior, pondasi kolom, dan lainnya. Sebuah komponen secara umum terdiri dari beberapa material, tenaga kerja dan peralatan.

Biaya masing-masing komponen disusun dari biaya per unit dari material yang digunakan dan perkiraan kuantitas dari material, koefisien dan upah tenaga kerja, koefisien dan sewa peralatan yang digunakan untuk membangun komponen tersebut. Konsep mendasar dari pendekatan BOCC adalah mengukur relatif harga pada level komponen konstruksi. Sebuah komponen kemudian dibagi-bagi kembali ke dalam

beberapa item pekerjaan konstruksi. Komponen konstruksi dapat dianggap sebagai agregasi dari beberapa item pekerjaan konstruksi yang meliputi material, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan item pekerjaan tersebut.

Komponen-komponen yang digunakan dalam penghitungan diagram timbang IKK 2016 berbeda antara bangunan 1 (bangunan tempat tinggal), bangunan 2 (bangunan umum untuk pertanian, bangunan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan, bangunan umum untuk jaringan air, listrik dan komunikasi), bangunan 3 (bangunan lainnya).

Gambar 4. Hubungan antara Proyek, Sistem dan Komponen



Pendekatan BOCC menggunakan 3 sistem penimbang, yaitu:

1. W1 adalah penimbang yang digunakan pada level agregasi jenis bangunan seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, jaringan dan bangunan lainnya
2. W2 adalah penimbang untuk agregasi pada level sistem konstruksi
3. W3 adalah penimbang untuk agregasi pada level komponen yang termasuk upah tenaga kerja dan sewa peralatan

Prosedur Penghitungan Penimbang

Langkah awal yang dilakukan untuk menghitung penimbang IKK adalah mengumpulkan *Bill of Quantity* (BoQ). Pengumpulan BoQ ini dilakukan melalui survei diagram timbang IKK yang lebih lengkap, yaitu menggunakan updating BoQ sampai tahun 2015. BoQ yang dikumpulkan dalam survei ini adalah BoQ realisasi pembangunan suatu konstruksi selama tahun 2016 di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Jika tidak ada pembangunan selama tahun 2016 maka bisa digantikan dengan BoQ dari pembangunan pada tahun 2015. BoQ ini dikumpulkan dari masing-masing Kabupaten/Kota agar setiap Kabupaten/Kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Tahapan penghitungan diagram timbang dari data BoQ untuk masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pengkodean Data BoQ

Pengkodean merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pengolahan data BoQ. Terdapat beberapa macam kode yang diberikan, diantaranya:

- a. Melakukan pengkodean jenis bangunan dan kabupaten/kota untuk masing-masing jenis dokumen BoQ yang dikumpulkan.
- b. Melakukan pengkodean sistem pada setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ.
- c. Melakukan pengkodean jenis komponen dari setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ.

Setiap uraian pekerjaan BoQ terdapat beberapa bahan bangunan, tenaga kerja yang digunakan, dan sewa peralatan.

Contoh uraian komoditas dapat dilihat di bawah ini

No	Jenis Pekerjaan	Jasa Konstruksi/Upah																										
		Batu(m3)			Semen(kg)			Kayu kelas III (Kayu)			Besi Beton (kg)																	
		Pasir Cor/Beton		Batu beih/kali/gunung	Semen Portland(PC)		Nanta,dll)			Polos dia. 6-16 mm		Pembantu Tukang			Tukang			Kepala Tukang										
		1102	1201		1501		1602		4101		5401		5402		5403		5405											
		Vol	Harga	Nilai	Vol	Harga	Nilai	Vol	Harga	Nilai	Vol	Harga	Nilai	Vol	Harga	Nilai	Vol	Harga	Nilai									
3	Pek.Beton bertulang kolom praktis K 175	0,54	170000	91800	3,51	160000	129600	336	1080	362880	0,4	700000	293000	105	7000	735000	7,05	45000	317250	2,38	55000	130625	2053	61000	123130	0,353	60000	21180

Contoh pengkodean:

Pencatat						: Anggun Melati K			
Provinsi						: Aceh			
Kab/Kota						: Kota Banda Aceh			
Kegiatan						: Pembangunan Gedung Kantor			
Jenis pekerjaan						: Pembangunan Kantor Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh			
Luas bangunan/panjang jalan/jembatan						:.....m2			
Kode	BoQ	Kode Bangunan	Kode Sistem	Kode Komponen	No	Jenis Pekerjaan	Proyek		
					No	Jenis Pekerjaan	Nilai	Volume	Jumlah
					I	PERSIAPAN			
017604	Pembangunan Gedung Kantor	01	1	7	1	Air Kerja	23750000	25	950000
017604	Pembangunan Gedung Kantor	01	1	7	2	Listrik Kerja	1459500	1	1459500
017604	Pembangunan Gedung Kantor	01	1	7	3	P3K	700000	1	700000
017604	Pembangunan Gedung Kantor	01	1	3	4	Papan Proyek	400000	1	400000
017604	Pembangunan Gedung Kantor	01	1	7	5	Kantor dan Gudang	5000000	20	250000
017604	Pembangunan Gedung Kantor	01	1	3	6	Pasang Booplank	851200	20	42560
017604	Pembangunan Gedung Kantor	01	1	1	7	Dokumen dan Biaya IMB	9000000	300	300000
					II	PEKERJAAN STRUKTUR			
					1	Pekerjaan Pondasi			0
					a.	Pekerjaan Pondasi Poer Plat			0
017604	Pembangunan Gedung Kantor	01	2	1	a.1	Galian Tanah	255150	13,5	18900
017604	Pembangunan Gedung Kantor	01	2	3	a.2	Pasir Alas t=5 cm	50220	0,45	111600
017604	Pembangunan Gedung Kantor	01	2	6	a.3	Lantai Kerja	240799,5	0,45	535110
017604	Pembangunan Gedung Kantor	01	2	10	a.4	Cor Beton Bertulang K-225	9796707	2,7	3628410
017604	Pembangunan Gedung Kantor	01	2	14	a.5	Bekisting	735135,75	4,05	181515
					3	Pekerjaan Kolom			0
					a.	K1	-	4,09	0
017604	Pembangunan Gedung Kantor	01	3	4	(an G-09)	Beton K-225	1049360	1	1049360
017604	Pembangunan Gedung Kantor	01	3	17	(an G-04)	Pembesian Polos dia 12	2152020	133,5	16120
017604	Pembangunan Gedung Kantor	01	3	17	(an G-04)	Pembesian Polos dia 3	681070	42,25	16120
017604	Pembangunan Gedung Kantor	01	3	12	(an G-14)	Bekisting	1828120,84	12,376	147715

2. Menghitung *share* nilai untuk masing-masing tahapan penimbang (W1,W2, dan W3) setiap kabupaten/kota

a. Menghitung penimbang W1 setiap kabupaten/kota

Pada tahapan penimbang W1 dihitung *share* nilai setiap sistem untuk masing-masing bangunan.

Nilai sistem adalah jumlah nilai dari seluruh bahan bangunan, upah tenaga kerja, sewa peralatan yang digunakan dalam suatu sistem konstruksi. Penimbang W1 diperoleh dengan menggunakan rumus berikut:

$$W1_i = \frac{Nilai\ Sistem_i}{\sum_{i=1}^{n1} Nilai\ Sistem_i}$$

n1= 1,2,...,8 untuk bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal

n1= 1,2,...,6 untuk bangunan selainnya

- b. Menghitung penimbang W2 setiap kabupaten/kota

Pada tahapan penimbang W2 dihitung *share* nilai setiap komponen untuk masing-masing sistem.

Nilai komponen adalah jumlah nilai dari seluruh bahan bangunan, upah tenaga kerja, sewa peralatan yang digunakan dalam sebuah komponen konstruksi. Penimbang W2 bisa diperoleh dengan rumus berikut:

$$W2_{ij} = W1_i \cdot \frac{Nilai\ Komponen_{ij}}{\sum_j^{n2} Nilai\ Komponen_{ij}}$$

n2 menunjukkan jumlah komponen dalam sistem yang bersangkutan.

- c. Menghitung *share* untuk penimbang W3 setiap kabupaten/kota

Pada tahapan penimbang W3 dihitung *share* nilai setiap komoditi untuk masing-masing komponen. Penimbang W3 bisa diperoleh dengan rumus berikut:

$$W3_{ijk} = W2_{ij} \cdot \frac{Nilai\ Komoditi_{ijk}}{\sum_k^{n3} Nilai\ Komponen_{ij}}$$

n3 menunjukkan jumlah komoditi pada komponen yang bersangkutan. Dimana:

$$\sum_i^{n_1} W_i = 1$$

$$\sum_i^{n_1} \sum_j^{n_2} W_{ij} = 1$$

$$\sum_i^{n_1} \sum_j^{n_2} \sum_k^{n_3} W_{ijk} = 1$$

Selain sistem penimbang dengan menggunakan pendekatan BOCC, untuk menghitung IKK juga menggunakan penimbang umum (WO) yang digunakan sebagai penghubung masing-masing jenis bangunan menjadi suatu kesatuan konstruksi. Penimbang umum berasal dari realisasi anggaran kabupaten/kota untuk pembangunan konstruksi yang diperoleh melalui survei Keuangan Pemda Tingkat II (K-II) dari Subdirektorat Keuangan dan Teknologi Informasi dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dari data realisasi anggaran daerah tingkat II untuk pembangunan masing-masing jenis bangunan diperoleh bobot masing-masing jenis bangunan ke total konstruksi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

2.3 Kegiatan Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data harga bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi ini mencakup :

1. Pengumpulan data harga bahan bangunan, harga sewa alat-alat berat yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota dari 34 Provinsi di Indonesia.
2. Jenis bahan bangunan/konstruksi yang dikumpulkan data harganya adalah jenis barang yang digunakan dalam kegiatan konstruksi seperti yang terangkum dalam kuesioner VIKK2016.
3. Harga sewa alat-alat berat konstruksi yang dikumpulkan adalah alat-alat berat yang biasa digunakan dalam kegiatan konstruksi seperti yang tertuang dalam kuesioner VIKK2016.
4. Upah jasa konstruksi meliputi upah per satuan/unit dan tunjangan lainnya dari mandor, kepala tukang, tukang batu, tukang kayu, tukang cat, tukang listrik, dan pembantu tukang.
5. Responden survei IKK adalah pedagang grosir/distributor/pedagang yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor, dan kategori lainnya seperti: kontraktor, dinas PU atau instansi terkait lainnya (khusus untuk mengumpulkan data harga sewa alat-alat berat, upah pekerja konstruksi). Pemilihan responden dilakukan secara purposif dengan mengutamakan pedagang Grosir. Jika tidak ada pedagang Grosir maka dipilih responden dengan urutan skala prioritas yaitu

produsen kemudian pedagang campuran (grosir melayani eceran). Khusus untuk responden pedagang campuran, yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam partai besar (grosir).

6. Kegiatan pencacahan survei ini menggunakan 4 (empat) periode pencacahan, yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober 2016. Dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi sehingga lebih menggambarkan fluktuasi harga di bidang konstruksi.

2.4 Kuesioner yang Digunakan

Untuk mengumpulkan data harga bahan bangunan, upah jasa konstruksi dan sewa alat berat digunakan 1 (satu) daftar pertanyaan yakni daftar VIKK2016. Daftar VIKK2016 digunakan masing-masing selama 4 (empat) periode pencacahan, yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober.

Identifikasi Kualitas Barang

Agar hasil pengumpulan data harga sesuai dengan kebutuhan seperti yang tertuang dalam daftar VIKK2016, maka perlu dilakukan pemilihan kualitas sebagai berikut:

1. Kualitas terpilih harus sesuai ketentuan, yaitu kualitas yang biasanya (umum) ada dan digunakan di tiap-tiap kabupaten/kota dan tertulis dalam pilihan Daftar VIKK2016.

Contoh: Jenis barang: Kayu balok

Kualitas: kayu kelas I, kayu kelas II, dan seterusnya

3. Apabila kualitas jenis barang tidak tersedia dalam pilihan, maka pilih kualitas yang tersedia di pedagang dan dominan digunakan di kabupaten/kota bersangkutan dengan menggunakan satuan standar yang tertulis dalam daftar.

2.5 Konsep dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Harga perdagangan **besar/grosir** (HPB) adalah harga **transaksi yang sudah terjadi** antara pedagang grosir sebagai penjual dengan

pedagang berikutnya sebagai pembeli secara *party/grosir* atas suatu barang.

2. **Harga produsen** adalah harga **transaksi yang sudah terjadi** antara produsen sebagai penjual dengan pedagang besar/distributor sebagai pembeli secara *party/grosir* atas suatu barang.
3. **Harga eceran** adalah harga **transaksi yang sudah terjadi** antara pedagang sebagai penjual dengan **rumah tangga** sebagai pembeli yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga langsung, **bukan untuk ditransaksikan lagi** atas suatu barang.
4. **Bahan bangunan/konstruksi** adalah material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunan/konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.
5. **Produsen** adalah pembuat/penghasil material baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan peralatan/mesin.
6. **Pedagang grosir** adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain atau kontraktor bangunan.
7. **Pedagang campuran** adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain, kontraktor bangunan, dan rumah tangga.

8. **Kegiatan Konstruksi** adalah suatu kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang dimaksud dalam survei ini adalah hanya kegiatan investasi (pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah nilai aset). Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi.
9. **Harga sewa alat berat konstruksi** adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, mingguan, atau bulanan. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah unit/jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek dan juga tidak termasuk biaya jasa operator.
10. **Hydrolic Excavator** adalah suatu mesin alat berat yang berfungsi untuk menggali tanah dan menuangkannya ke tempat lain.

11. **Buldozer/Tracked Tractor** adalah alat berat yang berfungsi untuk menggusur/memindahkan (mendorong) tanah dalam jarak pendek.
12. **Skid Steer Loader** adalah sebuah loader dengan frame body kecil yang kaku dan kuat, mesin yang bertenaga dengan lift arm (lengan angkat) yang digunakan untuk memasang berbagai tools (peralatan) dan tambahan lainnya.
13. **Tandem Vibrating Roller** adalah mesin penumbuk/pemadat jalan tipe tandem dengan penggerak roda belakang. Peralatan dilengkapi dua roda silindrical steel wheel (roda baja) dengan ukuran sama dan perangkat vibrator, sehingga alat ini juga berfungsi sebagai compactor.
14. **Compact Track Loader** adalah alat berat beroda karet, hanya mampu beroperasi di daerah yang keras dan rata.
15. **Dumptruck** adalah kendaraan angkut jarak jauh mempunyai bak angkut yang bisa diungkit secara hidrolik untuk menurunkan muatannya.
16. **Balas Jasa Konstruksi** adalah upah/gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada tenaga kerja di bidang konstruksi tiap satuan/unit orang/hari (O-H). Tunjangan lainnya yang dimaksud adalah semua pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja sektor konstruksi yang berupa makanan, perumahan/penginapan, jaminan sosial, dan sebagainya.

17. **Mandor** adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya proyek dan berkoordinasi dengan kepala tukang. Pada pekerjaan yang lebih kecil, Mandor merangkap kepala tukang.
18. **Kepala Tukang**, adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas mengawasi dan membimbing buruh konstruksi untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan.
19. **Tukang batu** adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas untuk memasang batu kali, batu bata, ubin, dan membuat plester tembok. Alat kerja yang digunakan biasanya adalah cetok, mal, dan water pass.
20. **Tukang kayu** adalah buruh konstruksi yang mempunyai tugas untuk membuat struktur bangunan dari kayu dan alat kerja yang digunakan biasanya adalah serut, gergaji, bor, pahat, dll.
21. **Tukang cat** adalah buruh konstruksi yang bekerja untuk mengecat tembok, papan, dan dinding lainnya.
22. **Tukang listrik** adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas memasang instalasi listrik & perlengkapannya dan memasang system listrik generator, trafo, dll.

3. STATISTIK IKK

- 3.1. Keadaan Geografis**
- 3.2. Penduduk**
- 3.3. Keuangan Daerah**
- 3.4. IKK Kota Banda Aceh Tahun 2016**
- 3.5. Perbandingan IKK Kota Banda Aceh dengan kabupaten/kota lain**

3. STATISTIK IKK

3.1. Keadaan Geografis

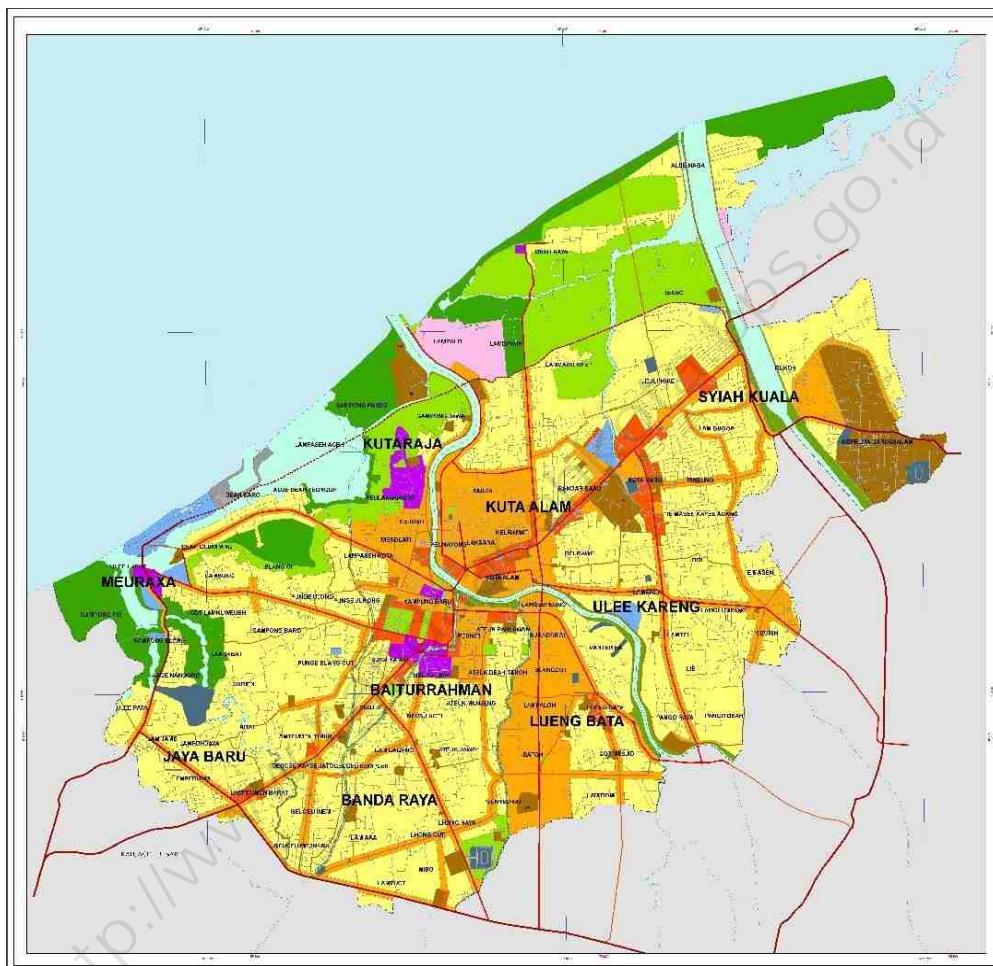
Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh terletak antara 050° 16' 15" - 050° 36' 16" Lintang Utara dan 950° 16' 15" - 950° 22' 35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah administratif Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau sekitar 61,36 Km². Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kota Banda Aceh terdiri atas 9 kecamatan yang terbagi dalam 90 gampong (desa) serta 17 kemukiman. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Syiah Kuala (14,24 Km²), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Jaya Baru (3,78 Km²).

Wilayah Kota Banda Aceh dikelilingi oleh Kabupaten Aceh Besar yang merupakan batas wilayah Timur dan Selatan. Kota Banda Aceh berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah Utara dan Samudera Indonesia di sebelah Barat.

Tahun 2016, suhu udara rata-rata di Kota Banda Aceh berkisar antara 26,4°C sampai dengan 28,3°C. Rata-rata curah hujan tahun 2016 terendah sebesar 51,0 mm yang terjadi pada bulan April, sedangkan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi selama bulan November sebesar 487,4 mm. Kelembaban udara maksimum bervariasi antara 84,0 persen sampai dengan 97,0 persen, sedangkan kecepatan angin di Kota Banda

Aceh berkisar antara 9 knot sampai dengan 23 knot.

Gambar 5. Peta Wilayah Kota Banda Aceh



3.2. Penduduk

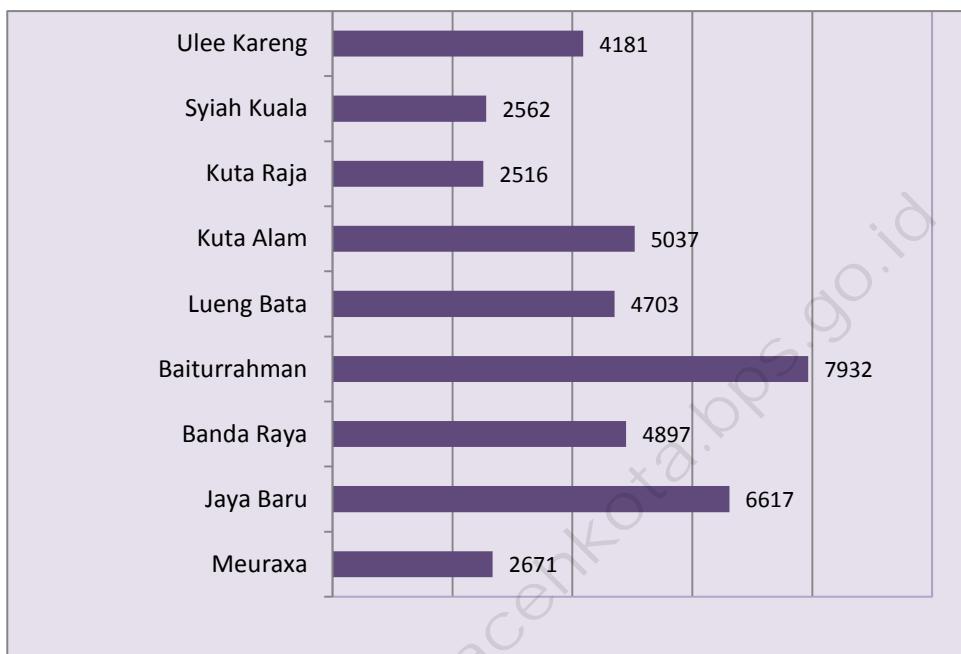
Penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2016 sebanyak 254.904 jiwa yang terdiri dari 131.010 jiwa penduduk laki-laki dan 123.894 jiwa penduduk perempuan. Kota Banda Aceh mengalami pertambahan

penduduk sebesar 4601 jiwa atau sekitar 1,84 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2015. Jumlah penduduk laki-laki secara umum lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh sex rasio yang nilainya lebih besar dari 100. Seperti halnya pada tahun 2015, maka pada tahun 2016 untuk setiap 106 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan.

Jumlah rumah tangga di Kota Banda Aceh ialah 62.774, dimana rumah tangga terbanyak terdapat di Kecamatan Kuta Alam yaitu 11.846, disusul oleh Kecamatan Syiah Kuala dengan jumlah 10.241 rumah tangga. Sementara itu jumlah rumah tangga paling sedikit terdapat di Kecamatan Kuta Raja sebanyak 3.360.

Kecamatan dengan penduduk terpadat di Kota Banda Aceh ialah Kecamatan Baiturrahman yaitu 7.932 jiwa/km². Kecamatan lainnya dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan Jaya Baru dengan jumlah 6.617 jiwa/km². Sebaliknya kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang rendah masing-masing Kecamatan Meuraxa (2.671 jiwa/km²), Kecamatan Syiah Kuala (2.562 jiwa/km²), serta Kecamatan Kuta Raja memiliki kepadatan penduduk yang terendah yaitu 2.516 jiwa/km².

Gambar 6. Kepadatan Penduduk Kota Banda Aceh



3.3. Keuangan Daerah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kondisi keuangan di daerah tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi sumber pendapatan daerah sehingga tidak terlalu menggantungkan diri pada keuangan pemerintah pusat. Kenyataannya, hampir seluruh daerah di Indonesia masih menggantungkan diri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya.

Tabel 2. Realisasi Keuangan Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh, 2016

No	Jenis Penerimaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
I. Pendapatan Daerah		1.321.704.923.080
1. Pendapatan Asli Daerah		258.591.409.669
2. Dana Perimbangan		801.801.081.470
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		261.312.431.941
II. Belanja Daerah		1.331.611.774.489
1. Belanja Tak Langsung		693.936.591.720
2. Belanja Langsung		637.675.182.769
III. Pembiayaan		79.295.939.974
1. Penerimaan Pembiayaan		131.322.140.556
2. Pengeluaran Pembiayaan		52.026.200.582
3. Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan		69.389.088.566
Jumlah Pendapatan Daerah		1.321.704.923.080

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh tahun 2016 sebesar Rp.258.591.409.669,-. Sementara itu, Dana Perimbangan Kota Banda Aceh tahun 2016 sebesar Rp.801.801.081.470,-. Belanja Daerah pada tahun ini meningkat sebesar 11,96 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016, realisasi pajak bumi dan bangunan di Kota Banda Aceh adalah sebesar Rp.4.670.995.017,- atau 58,40 persen dari target yang diharapkan yaitu sebesar Rp.7.997.917.578,-. Rincian

realisasi pajak bumi dan bangunan tiap kecamatan di Kota Banda Aceh dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut:

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2016

Kecamatan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Meuraxa	284.085.276	190.801.023	67,16
Jaya Baru	443.137.238	254.760.033	57,49
Banda Raya	724.710.214	387.657.620	53,49
Baiturrahman	1.261.979.615	766.825.366	60,76
Lueng Bata	1.072.091.579	489.025.162	45,61
Kuta Alam	1.761.570.561	1.302.577.873	73,94
Kuta Raja	214.360.528	141.150.404	65,85
Syiah Kuala	1.293.206.732	677.864.216	52,42
Ulee Kareng	942.829.835	460.333.320	48,82
Jumlah	7.997.917.578	4.670.995.017	58,40

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh

3.4. IKK Kota Banda Aceh Tahun 2016

Penghitungan IKK dilakukan pada setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Indonesia dengan menggunakan metode jenis barang dan jasa, serta waktu pencacahan yang sama sehingga hasilnya *comparable* untuk menggambarkan tingkat kemahalan kontruksi antar wilayah se-Indonesia dalam kurun waktu yang sama.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2016 telah dihitung untuk 508 Kabupaten/Kota dari 34 Provinsi di Indonesia, termasuk di

antaranya adalah IKK Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. IKK Kota Banda Aceh pada tahun 2015 sebesar 94,97 dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Aceh adalah 97,74. Adapun IKK rata-rata nasional adalah sebesar 100 dimana Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai acuan (IKK Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur sama dengan 100). IKK Kota Banda Aceh pada tahun ini berada di bawah IKK rata-rata nasional, begitu pula IKK Provinsi Aceh yang juga berada di bawah IKK rata-rata nasional.

3.5. Perbandingan IKK Kota Banda Aceh dengan Kabupaten/Kota Lainnya

Angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada tahun 2016 berkisar antara 86 sampai dengan 104. Berdasarkan level Provinsi Aceh, IKK Kabupaten Aceh Tamiang dengan nilai sebesar 86,90 adalah IKK dengan indeks terendah, sebaliknya posisi IKK tertinggi ialah Kabupaten Aceh Utara dengan nilai IKK 104,28. IKK Kota Banda Aceh sebesar 94,57 berada di urutan ke 10 dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Sementara itu untuk level provinsi, bila diurutkan dari yang terendah, angka IKK Provinsi Aceh sebesar 100,14 menempati peringkat ke-9 dari 34 provinsi di Indonesia. IKK provinsi yang tertinggi adalah IKK Provinsi Papua sebesar 239,98 dan IKK terendah adalah IKK Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 93,70.

Tabel 4. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1101	Simeulue	98,24
2	1102	Aceh Singkil	92,44
3	1103	Aceh Selatan	93,85
4	1104	Aceh Tenggara	95,87
5	1105	Aceh Timur	96,00
6	1106	Aceh Tengah	95,85
7	1107	Aceh Barat	96,02
8	1108	Aceh Besar	91,54
9	1109	Pidie	91,86
10	1110	Bireuen	99,56
11	1111	Aceh Utara	104,28
12	1112	Aceh Barat Daya	89,16
13	1113	Gayo Lues	97,51
14	1114	Aceh Tamiang	86,90
15	1115	Nagan Raya	95,24
16	1116	Aceh Jaya	90,50
17	1117	Bener Meriah	94,60
18	1118	Pidie Jaya	87,69
19	1171	Banda Aceh	94,57
20	1172	Sabang	96,14
21	1173	Langsa	96,25
22	1174	Lhokseumawe	101,12
23	1175	Subulussalam	92,79

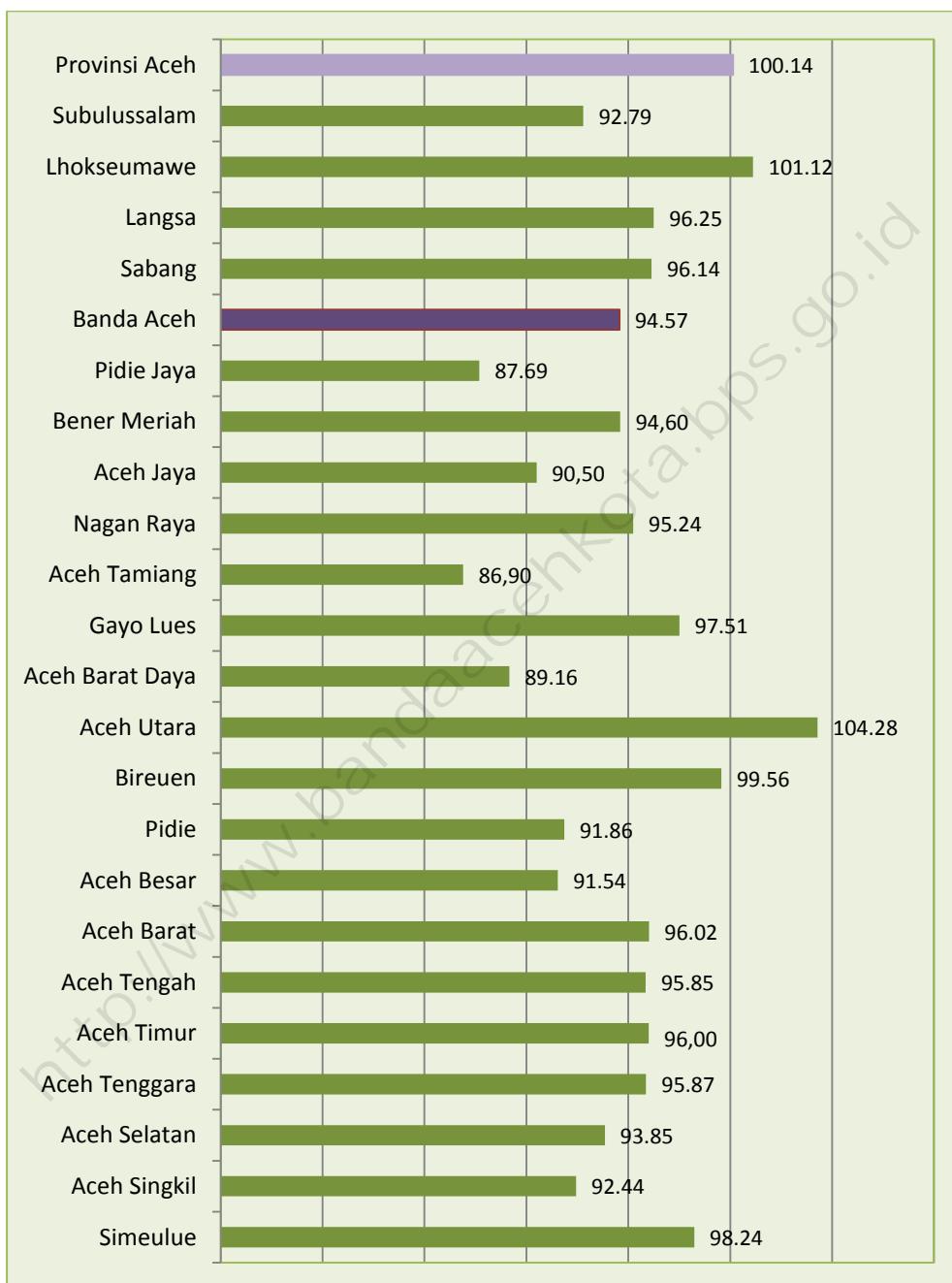
Sumber: BPS RI

Tabel 5. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi di Indonesia 2016

No.	Provinsi	IKK
1	Aceh	100,14
2	Sumatera Utara	102,76
3	Sumatera Barat	103,69
4	Riau	103,49
5	Jambi	97,99
6	Sumatera Selatan	106,15
7	Bengkulu	101,86
8	Lampung	99,40
9	Kepulauan Bangka Belitung	107,64
10	Kepulauan Riau	125,89
11	DKI Jakarta	112,48
12	Jawa Barat	103,79
13	Jawa Tengah	98,96
14	DI Yogyakarta	100,65
15	Jawa Timur	101,78
16	Banten	103,66
17	Bali	113,32
18	Nusa Tenggara Barat	93,70
19	Nusa Tenggara Timur	99,82
20	Kalimantan Barat	117,91
21	Kalimantan Tengah	106,95
22	Kalimantan Selatan	103,55
23	Kalimantan Timur	117,60
24	Kalimantan Utara	127,99
25	Sulawesi Utara	111,62
26	Sulawesi Tengah	95,63
27	Sulawesi Selatan	99,11
28	Sulawesi Tenggara	107,98
29	Gorontalo	101,96
30	Sulawesi Barat	98,39
31	Maluku	121,76
32	Maluku Utara	121,99
33	Papua Barat	146,46
34	Papua	239,98

Sumber: BPS RI

Gambar 7. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016



Gambar 8. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi di Indonesia, 2016



Pada tahun 2016, hampir seluruh besaran IKK Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menunjukkan angka lebih rendah dari 100, hanya ada 2 (dua) Kabupaten/Kota yang memiliki IKK di atas 100 yaitu Kabupaten Aceh Utara dengan nilai IKK 104,28 dan Kota Lhokseumawe senilai 101,12. Disamping itu, angka IKK masing-masing Kabupaten/Kota yang berbeda-beda menunjukkan adanya variasi harga bangunan di masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh sebagai dampak dari lokasi yang sulit dan jauh dari pusat-pusat perekonomian.

Sebagai indeks spasial, besaran IKK lebih dipengaruhi oleh tingkat harga komoditas bahan bangunan antar daerah dibandingkan dengan perkembangan harga antar waku (*time series*) di suatu daerah. Di daerah-daerah yang jauh dari pusat produksi atau pusat distribusi, harga komoditas pada umumnya lebih mahal. Dengan kata lain, perbedaan harga barang antar daerah berkaitan erat dengan darimana barang tersebut berasal. Sebagian besar barang-barang yang masuk ke Banda Aceh berasal dari wilayah Medan, Sumatera Utara, Padang dan beberapa barang berasal dari Banda Aceh sendiri, Aceh Besar dan Bireuen. Perbedaan harga antar daerah, selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti permintaan dan penawaran, juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti jumlah pedagang besar di daerah tersebut dan kondisi jalan yang mempengaruhi jalur distribusi.

4. *PENUTUP*

4.1. Kesimpulan

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Banda Aceh sebesar 94,57.
2. IKK Kota Banda Aceh tahun 2016 berada pada posisi ke 14 dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
3. Untuk level provinsi, besaran IKK Provinsi Aceh berada di peringkat ke 26 (dua puluh enam) dari 34 Provinsi di Indonesia.
4. Variasi angka IKK kabupaten/kota di Provinsi Aceh menunjukkan adanya perbedaan biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan luas pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh Kuesioner VIKK2016



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI SERENTAK HARGA BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI SEWA ALAT BERAT, DAN UPAH JASA KONSTRUKSI DALAM RANGKA PENGHITUNGAN IKK PERIODE : APRIL 2016

PENJELASAN

- Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga material dan produk yang tersedia di lapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan buku pedoman.
- Responden adalah pedagang grosir/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/ pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang camuran (grossir merangkap eceran), atau pedagang eceran.
- Responden harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.
- Spesifikasi/kualitas barang dituliskan prioritas kualitas/merek barang yang setara. Jika tidak ditemukan, cari kualitas yang setara.
- Spesifikasi/kualitas barang setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas barang yang lama maka dicar pengganti yang setara.
- Isian kuesioner dipindahkan ke komputer menggunakan program data entri dan BPS RI. Hasil entri dikirim ke shpb@bps.go.id dengan cc ke BPS Provinsi masing-masing.
- Dilarang mengubah format file program data entri yang dikirim oleh SHPB.
- Dokumen yang sudah diperiksa dan dilantatlanjani oleh pengas pencacah, dan pemerkosa disimpan di BPS Kabupaten/Kota untuk digunakan pada saat rekonfiliasi di BPS Provinsi.

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT		BLOK II : KETERANGAN PENCACAH DAN PENGAWAS	
1. Provinsi		6. Nama Pengawas	
2. Kabupaten / Kota		7. NIP Pengawas	
		8. Tanggal Pengawasan	
		9. Tanda Tangan Pengawas	

APRIL 2016

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT), UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA TANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merk	Satuan Selembar (bahan, truk, dus, zat, lembar, rol, dlm)				Konversi satuan selembar satuan standar	Harga per satuan standar (Rp)	Nama responden (tokopedia)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, ds)				
				(1)	(2)	(3)	(4)								
Tanah Urug	Biasa	-	m ³												
Pasir	Pasir Pasang (pasir laut, pasir kali)	-	m ³												
Pasir	Pasir Beton / Cor (pasir gunung)	-	m ³												
Batu Pondasi	Batu Kali Belah	-	m ³												
Batu Bata	Batu bata tanah liat (bata merah)	-	m ³												
Batako	Batako berlubang (hollow block)	-	m ³												
Batako	Batako tidak berlubang (solid block)	-	m ³												

APRIL 2016

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1. PEDAGANG GROSIR 2. PRODUSEN 3. PEDAGANG ECERAN 4. PEDAGANG MERAJUKAN MEREK. UNTUK BARANG YANG BERNEGERI UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merk	Satuan					Kemasan satuan setempat			Nama responden (toko/pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
				Setempat (buah, truk, dus, zakk, lembar, rol, dll)	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)	Kemasan satuan standar	Harga per satuan standar	(13)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
Bata Ringan	Cellcon atau Hebel	I	m ³										
		II	m ³										
		III	m ³										
Batu Split	Ukuran 1 - 2 cm	I	m ³										
		II	m ³										
		III	m ³										
GAGAH	Ukuran 2 - 3 cm	I	m ³										
		II	m ³										
		III	m ³										
	Ukuran 3 - 4 cm	I	m ³										
		II	m ³										
		III	m ³										
	Seng Gelombang	I	lembar										
		II	lembar										
		III	lembar										
Paku	Ukuran (0,03 x 90 x 180) cm	I	lembar										
		II	lembar										
		III	lembar										
	Paku Kayu 2"- 6"	I	kg										
		II	kg										
		III	kg										
	Paku Beton	I	kg										
		II	kg										
		III	kg										
	Paku Seng	I	kg										
		II	kg										
		III	kg										

APRIL 2016

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1.FEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG ECERAN 4.FEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT), UNTUK BAHAR YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

APRIL 2016

Jenis Barang	Kualitas Barang	Respondeen	Satuan Standar	Merk	Ukuran Satuan sedempat				Konversi satuan ke satuan standar	Harga per satuan standar (Rp)	Nama responden (tokopedia)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
					Satuan Sedempat (buah, truk, dus, zak, lembar, roti,dll)	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Bak Mandi Fiber	Ukuran 60 x 60 x 60 cm	WALRUS	I buah									
Ukuran			II buah									
Kloset	Kloset duduk standar lengkap dengan tabung	TOTO	I buah									
			II buah									
Kloset jongkok			I buah									
			II buah									
Seng plat BJLS			III buah									
Seng Plat	Seng plat BJLS 20 L=60	WAVIN	I m									
Pipa PVC	AW Ø 1/2" panjang 4 m		I batang									
			II batang									
			III batang									
	AW Ø 3/4" panjang 4 m		I batang									
			II batang									
			III batang									
	AW Ø 1" panjang 4 m		I batang									
			II batang									
			III batang									

APRIL 2016

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG MERAJANG/PECAH ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT), UNIKU BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENGGUNAKAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar Responden	Merk	Satuan Sementara				Satuan standar				Harga per satuan standar (Rp)	Nama responden (tokopedia)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)	
				Stempat (buah, truk, dus, zak, lembar, roll, dll)	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)	Konversi satuan sementara ke satuan standar	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pipa PVC WAVIN	AW Ø 4" panjang 4 m	I batang													
		II batang													
		III batang													
	D Ø 3" panjang 4 m	I batang													
Kayu Balok	D Ø 4" panjang 4 m	II batang													
		III batang													
		I batang													
		II batang													
Kayu Kelas I	Kayu kelas I	I													
		II													
		III													
		IV													
Kayu Papan	Kayu kelas II	I													
		II													
		III													
		IV													
Kayu Kelas III	Kayu kelas III	I													
		II													
		III													
		IV													
Kayu Kelas I	Kayu kelas I	I													
		II													
		III													
		IV													
Kayu Kelas II	Kayu kelas II	I													
		II													
		III													
		IV													
Kayu Kelas III	Kayu kelas III	I													
		II													
		III													
		IV													

APRIL 2016

PRIORITAS RESPONDEN: 1 PEDAGANG GROSIR 2 PRODUSEN 3 PEAGANG GROSIR MELAKUKAN FECERAN 4 PEAGANG FECERAN (HARGA TANPA ONGKOS KARGU). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCAKAT SESAI DENGAN TINGKAT MERK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merk	Satuan Satuan setempat						Komersi satuan setempat ke satuan standar	Harga per satuan standar (Rp)	Nama responden (tokopedia)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)				
				Satuan Setempat (buah, truk, dus, zak, lembar, rol, dll)		Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)								
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								
				-	lembar												
				Triplek 3mm	II	lembar											
					III	lembar											
					-	lembar											
				Triplek 4mm	II	lembar											
					III	lembar											
					-	lembar											
				Kayu Lapis/Triplek													
				Triplek 6mm	II	lembar											
					III	lembar											
					-	lembar											
				Triplek/ Plywood 9mm	II	lembar											
					III	lembar											
					-	lembar											
				Triplek/ Plywood 12mm	II	lembar											
					III	lembar											
					-	lembar											
				Cat Emulsion	Cat Tembok eksterior	I	25kg										
						II	25kg										
						III	25kg										
				Cat Emulsion	Cat Tembok Interior	I	25kg										
						II	25kg										
						III	25kg										
				Cat Genteng		I	20kg										
						II	20kg										
						III	20kg										
				Cat Minyak AVIAN	Cat Besi/Kayu	I	kg										
						II	kg										
						III	kg										

APRIL 2016

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1. PEDAGANG GROSIR 2. PRODUSEN 3. PEDAGANG ECERAN 4. PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT), UNTUK BARANG YANG YANG BERMERK UTAMAKAN MENCAKAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MERK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MERK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merk	Satuan			Ukuran Satuan seempat			Konversi satuan seempat ke satuan standar	Harga per satuan seempat (Rp)	Harga per satuan standar (Rp)	Nama responden (tokopedia)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dkk)					
				Responsiden	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]										
Cat Minyak		-	kg																
ALTEX	Cat Meni Besi/Kayu	II	kg																
		III	kg																
Tegel/Keramik	Keramik uk. 30x30 cm	I	m ²																
		II	m ²																
		III	m ²																
MULIA	Keramik uk. 40x40cm	I	m ²																
		II	m ²																
		III	m ²																
Genteng/Atap	Keramik uk. 30x30 cm warnamotif	I	m ²																
		II	m ²																
		III	m ²																
	Keramik uk. 40x40 cm warnamotif	I	m ²																
		II	m ²																
		III	m ²																
	Genteng tanah liat tradisional (tidak berglasir)	I	buah																
		II	buah																
		III	buah																
	Genteng tanah liat keramik	I	buah																
		II	buah																
		III	buah																
	Atap metal (TIDAK BERPASIR)	I	lembar																
		II	lembar																
		III	lembar																
	Atap asbes	I	lembar																
		II	lembar																
		III	lembar																

APRIL 2016

PRIORITAS RESPONDEEN 1 PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN, 4 PEDAGANG ECERAN, 4 PEDAGANG RESMI MENCAKHLUKKAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA (ANGKUT) UNTUK BARANG YANG TIDAK DILISTOK.

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

Jenis Barang	Kualitas Banting	Satuan Standar	Satuan	Ukuran Satuan sekumpul	Komersial satuan sekumpul ke satuan standar			Harga per satuan sekumpul (Rp)	Harga per satuan sekumpul (Rp)	Nama responden dan keterangan
					Panjang (m)	Lebah (m)	Tinggi (m)			
Jln. Burung		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kaca	Kaca polos bening 3 mm	I								
ASAHI	Kaca polos bening 5 mm	II								
	Kaca riben 5 mm	III								
	Curah Grade 6070 Lokal	I	ton							
	Drum Grade 6070 (155 kg) Lokal	II	ton							
	Drum Grade 6070 (155 kg) Impor	III	ton							
	Curah Grade 6070 Impor	I	ton							
		II	ton							
		III	ton							
	Gypsum	Gypsum plafon 9 mm	I							
	JAYABOARD	Gypsum lvt pvc 220 cm X 1.1 cm X 3cm	II	Batang						
		III	Batang							

APRIL 2016

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PERIODIKAS RESPONDEN: 1. IFADAGANG SERUMAH DENGAN BAGIAN BERSAMA-SAMA
2. PHORON 3. PEDAGANG GROSIR MELAKUKAN KEGIATAN JUAL BELI
3. POKER 4. TIDAK ADA.

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL										
PRIORITAS RESPONDEN: 1. PEDAGANG GRD 08 2. PRODUSEN 3. PEDAGANG GRD 09 MERANGKAP IC EBAN (HARGA TANPA CINGHAIS ANGKUT, UNTUK BAHANG YANG BEBEKNEK UTAMAKAN MENCALAH JESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK JIKA TIDAK ADA, PULIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.										
Jenis Bahan	Kualitas Bahan	Satuan Standard	Mata	Unsur Satuan barang			Harga per satuan barang standar (Rp)	Harga per satuan barang standar (Rp)	Nama dan Spesifikasi barang (Rp)	Referensi (link, atau via satuan barang, dlsb)
				(1)	(2)	(3)				
Kabel	Kabel NYA ukuran 1 x 1,5 mm ²	I	m	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ETERNA	Kabel NYA ukuran 1 x 2,5 mm ²	I	m	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Kabel NYM ukuran 3 x 2,5 mm ²	I	m	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Bahan rangunan sejap parang dan kayu keras	Kusen pintu (2m) x 1m	I	buah	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	Kusen jendela (50cm x 120cm)	I	buah	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)
Main Pump Air	Pompa Shallow Pump (mekanikal tangan)	I	buah	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)
	SHIMIZU	≤ d 7m)	buah	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)

APRIL 2016

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

Jenis Barang	Kualitas Bahan	Satuan Standar	Satuan Satuan setiap	Kotak			Harga per satuan setiap (Rp)	Harga per satuan setiap (Rp)	Harga per satuan setiap (Rp)
				[1]	[2]	[3]			
Nelen Pompa Air (TARPA OTOMATIS)	Pompa Sentri Jet Pump (Nedalam B-12m)	I II III	bush bush bush	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
SHIMIZU	Pompa Jet Pump (Nedalam 15- 25m)	I II III	bush bush bush						
	Profil Canal "C" type CB1075	I II III	batang batang batang						
	Profil Canal "C" type CB1075	I II III	batang batang batang						
	Profil "D" type / ring type AA	I II III	batang batang batang						
	Profil "D" type / ring type A	I II III	batang batang batang						
	Profil kalien aluminium 3 inch)	I II III	m m m						
ALEXINDO	Profil kalien aluminium 4 inch)	I II III	m m m						
	Aluminiun lembarai 0,5 mm panjang 2 m, lebar 1 m	I II III	lembar lembar lembar						

APRIL 2016

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1 PEDAGANG GROSIR 2 PRODUSEN 3 PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGGUT) UNTUK BARANG YANG YANG SAMA BERBERPATUTAN MENACAH SESUAI DE NGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merk	Satuan			Konservasi	Harga per satuan satuan ukuran (Rp)	Harga per satuan ukuran standar (Rp)	Harga per satuan standar (Rp)
				Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Diketahui kelebaran (cm)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Alumunium	Alumunium	1 lembar								
ALEXINDO	Iembaran 1 mm panjang 2 m, lebar 1 m	II III								
PENGUIN	Ukuran 350 x 450 mm	I II III								
Philips	Lampu pijar 25 W Lampu pijar 40 W	I II III								
	Lampu TL panjang 18-20 W	I II III								
	Lampu St. (L pendek) 15 W	I II III								

APRIL 2016

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

PHOTO BY RIAS RESPONDBEH. PADA KEGIATAN PENGETAHUAN DAN KONSEP SISTEM PEMERINTAHAN DI MASA KINI DAN DENGAN KONSEP SISTEM PEMERINTAHAN DI MASA DEPAN. KEGIATAN PENGETAHUAN DAN KONSEP SISTEM PEMERINTAHAN DI MASA KINI DAN DENGAN KONSEP SISTEM PEMERINTAHAN DI MASA DEPAN.

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL									
PRIORITAS RESPONDEN: 1 PEDAGANG GROSIR 2 PRODUSEN 3 PEDAGANG KEPERLUAN RUMAH TIDAK UNTUK BERPENGARUH PADA HARGA									
BANTAL YANG NAMENEK UTAMAKAN MENCACAH JESUAJ DENGAN PERINGKATAN PEK, JKA TIDAK ADA, Pilih Merek Lainnya yang setara.									
Ketentuan Isian: 1. Baris pertama isi dengan nama barang 2. Baris kedua isi dengan satuan standar 3. Baris ketiga isi dengan satuan standar yang diambil dari buku standar 4. Baris keempat isi dengan harga per satuan standar 5. Baris kelima isi dengan harga per satuan standar yang diambil dari buku pedagang 6. Baris keenam isi dengan nama responen 7. Baris ketujuh isi dengan nama barang 8. Baris kedelapan isi dengan satuan standar 9. Baris kesembilan isi dengan harga per satuan standar 10. Baris kesepuluh isi dengan harga per satuan standar yang diambil dari buku pedagang									
Baris 1	Baris 2	Baris 3	Baris 4	Baris 5	Baris 6	Baris 7	Baris 8	Baris 9	Baris 10
Kutut Banting	Satuan Standar	Nom.	Bahan	Pengukuran	Lokasi	Harga per satuan standar	Harga per satuan standar	Nama responen	Ket
15	151	151	151	151	151	151	151	151	151
Lampu	I	bush							
PHILLIPS	Lampe SL (1L, pendar) 20 W	II	bush						
MCR (SPLN 100-1993)	1 phasa 4 Ampere	II	bush						
SCHNEIDER	1 phasa 6 Ampere	II	bush						
	1 phasa 10 Ampere	II	bush						
		III	bush						

PEN-JEI ASIAN PENETRATION BLOCK III

LITERATUR

卷之三

卷之三

- PENEGASAN PE NICA CAHAN TIK**

PE NICA CAHAN HADIAH UNTUK BAHAYA-TERANG NATURAL PASIR, BATU PONGSAK, BATU SPLIT, BATUERA, BATA DAN SEMEN. DILAKUKAN DENGAN PROSES YANG TIDAK BERDAMPAK KEPADA MASA DEPAM.

PENUGASAN KULASIREPUBLIK MAS LARAH HADIS SAMA SETIAP TAHUNNYA.

PE NICA CAHAN HADIAH UNTUK BAHAYA-TERANG NATURAL PASIR, BATU PONGSAK, BATU SPLIT, BATUERA, BATA DAN SEMEN. DILAKUKAN DENGAN PROSES YANG TIDAK BERDAMPAK KEPADA MASA DEPAM.

PENUHNYA KULASIREPUBLIK MAS LARAH HADIS SAMA SETIAP TAHUNNYA.

UNIVERSITATI ALTAIGA,

10

APRIL 2016

BLOK IV. DATA SEWA ALAT BERAT DAN UPAH PEKERJA KONSTRUKSI

Responden: Jasa Penyewaan Alat Berat (umur alat berat maksimal 8 tahun, tanpa operator dan bahan bakar)

Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan/unit (lingkari kode satuan/unit)	Nilai sewa per satuan/unit (Rp)	Nama Responden	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Excavator PC-200	Kapasitas bucket 0,5 m ³	I (01) 1 BULAN II (01) 1 BULAN III (01) 1 BULAN	(02) 200 JAM (02) 200 JAM (02) 200 JAM	Dinas PU (harga transaksi)	(7)
	Kapasitas bucket 0,6 m ³	I (01) 1 BULAN II (01) 1 BULAN III (01) 1 BULAN	(02) 200 JAM (02) 200 JAM (02) 200 JAM	Dinas PU (harga transaksi)	
	Kapasitas bucket 0,4 m ³	I (01) 1 BULAN II (01) 1 BULAN III (01) 1 BULAN	(02) 200 JAM (02) 200 JAM (02) 200 JAM	Dinas PU (harga transaksi)	
	Universal Blade (U-Blade)	I (01) 1 BULAN II (01) 1 BULAN III (01) 1 BULAN	(02) 200 JAM (02) 200 JAM (02) 200 JAM	Dinas PU (harga transaksi)	
	Straight Blade (S-Blade)	I (01) 1 BULAN II (01) 1 BULAN III (01) 1 BULAN	(02) 200 JAM (02) 200 JAM (02) 200 JAM	Dinas PU (harga transaksi)	
	Bowl Digger	I (01) 1 BULAN II (01) 1 BULAN III (01) 1 BULAN	(02) 200 JAM (02) 200 JAM (02) 200 JAM	Dinas PU (harga transaksi)	
	Loader (Wheel atau Track)	I (01) 1 BULAN II (01) 1 BULAN III (01) 1 BULAN	(02) 200 JAM (02) 200 JAM (02) 200 JAM	Dinas PU (harga transaksi)	

Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan/unit (ingkari kode satuan/unit) (01) 1 BULAN (02) 200 JAM	Nilai sewa per satuan/unit (Rp)	Nama Responden	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Leader (Wheel) atau Track	Kapasitas bucket 0,6 m ³	I (01) 1 BULAN (02) 200 JAM II (01) 1 BULAN (02) 200 JAM III (01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	(7)
	Kapasitas bucket 0,4 m ³	I (01) 1 BULAN (02) 200 JAM II (01) 1 BULAN (02) 200 JAM III (01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
	8 - 10 ton	I (01) 1 BULAN (02) 200 JAM II (01) 1 BULAN (02) 200 JAM III (01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
	Tandem/Vibratin g Roller	I (01) 1 BULAN (02) 200 JAM II (01) 1 BULAN (02) 200 JAM III (01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
	kurang dari 8 ton	I (01) 1 BULAN (02) 200 JAM II (01) 1 BULAN (02) 200 JAM III (01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
	Kapasitas 20 ton (tronon)	I (01) 1 BULAN (02) 200 JAM II (01) 1 BULAN (02) 200 JAM III (01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
	Kapasitas 12 ton (engkel)	I (01) 1 BULAN (02) 200 JAM II (01) 1 BULAN (02) 200 JAM III (01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
	Dump Truck	I (01) 1 BULAN (02) 200 JAM II (01) 1 BULAN (02) 200 JAM III (01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
	Kapasitas 8 ton (coil diesel)	I (01) 1 BULAN (02) 200 JAM II (01) 1 BULAN (02) 200 JAM III (01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
Motor Grader	≤ 100 HP	I (01) 1 BULAN (02) 200 JAM II (01) 1 BULAN (02) 200 JAM III (01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
	> 100 HP	I (01) 1 BULAN (02) 200 JAM II (01) 1 BULAN (02) 200 JAM III (01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan/unit (lingkari kode satuan/unit)	Nilai sewa per satuan/unit (Rp)	Nama Respon den	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Asphalt Finisher		I	(01) 1 BULAN	(02) 200 JAM	Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN	(02) 200 JAM		
		III	(01) 1 BULAN	(02) 200 JAM		
60 KVA		I	(01) 1 BULAN	(02) 200 JAM	Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN	(02) 200 JAM		
		III	(01) 1 BULAN	(02) 200 JAM		
Generator set		I	(01) 1 BULAN	(02) 200 JAM	Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN	(02) 200 JAM		
		III	(01) 1 BULAN	(02) 200 JAM		
40 KVA		I	(01) 1 BULAN	(02) 200 JAM	Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN	(02) 200 JAM		
		III	(01) 1 BULAN	(02) 200 JAM		
20 KVA		I	(01) 1 BULAN	(02) 200 JAM	Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN	(02) 200 JAM		
		III	(01) 1 BULAN	(02) 200 JAM		
JASA KONSTRUKSI						
Upah Kepala Tukang		I	O-H	Dinas PU		
		II	O-H			
		III	O-H			
Upah Tukang Batu		I	O-H	Dinas PU		
		II	O-H			
		III	O-H			
Upah Tukang Kayu		I	O-H	Dinas PU		
		II	O-H			
		III	O-H			
Upah Instalator Listrik		I	Trik	Dinas PU		
		II	Trik			
		III	Trik			
Upah Pembantuan Tukang		I	O-H	Dinas PU		
		II	O-H			
		III	O-H			

<p>BLOK V : CATATAN</p>		
		<p>..... April 2016 Mengatakan, Kepala BPS Kabupaten / Kota NIP.</p>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDA ACEH
Jln Laksamana Malahayati Km 6,5 Baet, Aceh Besar
Telp. (0651) 8012501 Email : bps1171@bps.go.id
<http://bandaacehkota.bps.go.id>

